

## **MEDIA SAstra DAN PROPAGANDA KAPITALISME PABRIK GULA DI JAWA**

**Agus Sulton**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Ilmu Pendidikan

[agus\\_sul@yahoo.com](mailto:agus_sul@yahoo.com)

### **Abstrak**

*Kebijakan tanam paksa tidak membawa perubahan yang baik bagi rakyat pribumi Hindia. Hal ini mendorong sebagian rakyat pribumi protes melalui aksi masa dan pemogokan. Peristiwa tersebut mendorong Mas Marco Kartodikromo untuk ambil bagian menentang kebijakan pemerintah dengan memproduksi propaganda melalui karya sastra. Penelitian ini fokus terhadap peranan sastra dalam menciptakan propaganda kapitalisme pabrik gula di Jawa awal abad ke-20. Hasil penelitian ini menemukan, bahwa teks sastra novel Matahariah dan kumpulan puisi 'SAIR REMPAH-REMPAH' syarat akan propaganda anti kapitalisme dan anti dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah. Secara simbolik, teks-teks Mas Marco memantik ide-ide perubahan sosial, ekonomi, dan politik supaya tanah Hindia lepas dari belenggu kolonial.*

**Kata kunci:** *teks sastra, Mas Marco Kartodikromo, kapitalisme pabrik gula, perubahan sosial*

### **1. PENDAHULUAN**

Penanaman tebu sudah dikenal di pulau Jawa pada perempat pertama abad ke-17. Ketika itu pengusaha swasta dari kalangan bangsa Cina dan Eropa mengusahakan tanaman tebu di sekitar Batavia yang diikuti dengan pendirian pabrik-pabrik gula. Pada tahun 1750, di Jawa sudah terdapat 100 pabrik gula, 80 pabrik dibangun di Batavia dan selebihnya di Banten, Cirebon dan pantai utara Jawa Tengah. Banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri diimbangi pula perluasan penanaman tebu. Proses perluasan ini dilakukan dengan cara menyewa lahan-

lahan milik warga di pedesaan wilayah Batavia, Jawa Tengah, Jawa Timur. Berdasarkan laporan tahun 1796, di daerah pantai utara Jawa bagian Timur terdapat 1134 desa yang disewakan oleh VOC kepada orang Cina, yang sebagian tanahnya untuk perkebunan tebu (Kartodiharjo dan Suryo, 1991: 22; Mubyarto, 1992: 71; Wasino, 2008: 210).

Menginjak tahun 1830 penanaman besar-besaran di berbagai sektor tanaman, terutama yang memiliki nilai ekspor. Sistem ini disebut dengan sistem tanam paksa, dan berakhir pada tahun 1870. Kemudian sistem tersebut digantikan

sistem pihak swasta Eropa, terutama dari kalangan pemodal swasta dari Belanda. Perolehan tenaga kerja untuk perkebunan tidak dikerahkan secara paksa, tetapi dengan tenaga kerja bebas yang dibayar. Sementara itu, tanah diperoleh melalui cara menyewa kepada penduduk Bumiputera (Wasino, 2008: 61). Kondisi tersebut ternyata malah memperburuk kondisi sosial ekonomi rakyat pribumi. Ledakan pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab utama.

Menginjak tahun 1900, jumlah penduduk pribumi semakin meningkat dua kali lipat dari tahun 1870. Meskipun demikian, jumlah produksi bahan makanan tidak selajau dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Baay (2017: 32) menuturkan, pemerintah malah menaikkan beban pajak bagi rakyat pribumi, namun tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan Barat. Seorang anggota Tweede Kamer yang juga seorang sosialis waktu itu, Henri van Kol menulis tentang perjalanannya ke Jawa, "...Maka tidak ada kecaman yang terlalu tajam untuk mencela pemerintah yang telah membawa penduduk pribumi ke ambang kelaparan akibat kebijakan fiskal yang berlebihan dan keuangan yang mencekik. Mungkin berkat harga beras yang turun pada saat itu, bencana kelaparan tidak sampai melanda.

Meskipun demikian, harga beras tetap dirasa mahal bagi rakyat pribumi."

Baay (2017: 27-28) menambahkan, orang Eropa yang melakukan perjalanan ke Jawa dan berhubungan dengan penduduk pribumi tercengang dan kerap menceritakan gambaran sedih tentang kehidupan penduduk pribumi. Seorang pelancong di Yogyakarta memberi kesan berwarna-warni mengenai apa yang dilihatnya. Dengan penjiwaan yang khas ia mencatat: "Dan saya mengusulkan untuk melihat Hindia Belanda yang miskin sekali. Hindia Belanda yang miskin di kampung-kampung atau desa-desa. Tempat di mana jalan setapak berlumpur mengantar anda ke tempat luas dengan pondok-pondok untuk manusia dan hewan yang tak terkira jumlahnya. Sangat sulit dikatakan apakah manusia atau hewan yang paling pantas tinggal di sana.

Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk membentuk *Mindere Welvaart Commissie* (MWC), yakni suatu lembaga yang bertugas untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk Jawa dan Madura. Laporan lembaga tersebut telah menghasilkan 32 jilid buku. Namun, penyelidikan itu membawa dampak yang sangat sedikit. Hal ini mengukuhkan keadaan penduduk pribumi yang sangat memprihatinkan serta menekankan banyaknya penyebab yang mendasarinya

sehingga sulit untuk ditangani. Karena hal itu peraturan pemerintah yang kongkrit hampir tak pernah diambil (Baay, 2017: 28).

Mas Marco juga menyadari, akibat datangnya pemodal asing ke tanah Hindia malah tidak menjadikan rakyat sejahtera. Bahka, Baay (2017: 34-35) mencatat, paruh abad ke-19 permintaan terhadap tenaga pribumi bayaran (upah) mengalami kenaikan tajam akibat pertumbuhan penduduk Eropa serta kemunculan perusahaan-perusahaan Eropa di Hindia.

Menginjak awal abad ke-20, munculnya pemodal-pemodal asing di Hindia naik secara signifikan. Investasi dalam jumlah besar ditanam di Hindia, dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Eropa, tetapi juga perusahaan Amerika. Pada tahun 1909, dalam waktu satu tahun saja sudah berdiri 175 perusahaan di Hindia. Perusahaan-perusahaan ini hanya membutuhkan tenaga-tenaga Eropa yang memiliki kualitas tinggi, sedangkan rakyat pribumi hanya buruh rendahan dengan gaji kurang layak. Darsono mengamati, akibat sistem upah ini stratifikasi sosial di Hindia dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas pemodal dan kelas buruh, seperti kutipan:

Sekarang ini di Hindia timboel doea golongan manoesia, jaitoe

satoe golongan jang mempoenjai fabriek-fabriek, Maatschappij-Maatschappij Spoor dan tram, toko-toko dan sebagainya; dan jang kedoea golongan kaoem boeroeh matjam-matjam bangsa atau orang-orang jang bekerdja di peroesaha'an peroesaha'annja golongan jang kesatoe itoe. Ini golongan kaoem boeroeh ialah asalnja dari orang-orang tani, toekang membatik, toekang menenoen soedagar ketjil-ketjil macam-macam bangsa dan sebagainya, mereka mendjoeal tenaganja karena terdesak oleh oleh fabriek atau mesin dan oleh perdagangan besar.

Kelas pemodal adalah kelas yang memiliki pabrik ataupun alat produksi, sedangkan kelas buruh adalah kelas yang diperintah. Kelas diperintah ini lahir dari kelompok miskin desa yang melakukan urbanisasi ke kota untuk memperoleh pekerjaan. Dalam pembagian dua kelas ini, Darsono mengamati kalau orang pribumi akan menjadi kuli di negerinya sendiri.

Dalam konteks masa itu, para kuli yang bekerja di sektor industri di kota berasal dari pedesaan. Mereka hijrah ke kota akibat lahan-lahan yang sebelumnya mereka garap untuk ditanami padi dipaksa sewa oleh kepala desa dan *onderdemingen*

dengan uang sewa yang tidak sebanding apabila hasilnya ditanami padi. Seumpama mereka tidak pergi ke kota, maka akan menjadi kuli di pabrik gula untuk mengangkut hasil panen tebu ataupun pekerja di lahan kebun tebu. Gaji yang didapatkan dari buruh diperkebunan senilai 20-40 sen/hari, bagi yang suka kerja keras, para buruh juga bisa menggali lubang untuk kebutuhan perkebunan dengan gaji 3 sen/lubang. Namun jika tuan besar kurang puas dengan hasil kerjanya, maka para buruh mendapatkan cacian dan upahnya dikurangi separo menjadi 1,5 sen/lubang.

Memang pada awalnya peranan kepala desa adalah orang yang paling bertanggung jawab, di mata orang desa, yang mempertahankan diri terhadap kerusakan di desa. Kepala desa juga sebagai penghubung antara desa dengan penguasa yang lebih tinggi. Dengan demikian, kepala desa adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam batas-batas daerahnya. Kekuasaannya sebagai dapat diperoleh dari peranannya sebagai perantara dari desa dengan kekuasaan yang lebih tinggi. Tetapi kekuasaan yang terbesar berasal peranannya dalam menjalankan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan desa, dan dalam segala kemungkinan membendung segala pengaruh dan tekanan yang dapat mengganggu kerukunan desa. Sesudah

tahun 1870 paksaan pemerintah atas kepala desa berkurang, tetapi pengusaha-pengusaha perseorangan sekarang ingin mendapatkan kekuasaan kepala desa untuk memperoleh hak atas tanah dan kontrak kerja dengan desa. Menjelang tahun 1900, pengaruh Eropa telah memasuki masyarakat Hindia Belanda sampai ke pedesaan, dan dalam banyak hal membuat kepala desa menjadi proses ekonomi dan bagian pemerintahan Eropa (Niel, 1984: 33-34). Misalnya pada tahun 1919, para pengusaha perkebunan memberikan premi f 2.50,- untuk setiap bau (1 bau=7096,50 m<sup>2</sup>) kepada lurah-lurah yang dapat mengubah sawah-sawah desa menjadi perkebunan tebu (*Sinar Hindia*, 14 Mei 1918).

Dalam kesempatan lain, Darsono turut memberikan komentar, bahwa semakin besar kapital asing masuk di tanah Jawa, semakin hilang kepandaian anak Bumiputera menggarap tanah. Derajatnya orang petani semakin mundur, yakni dari sebelumnya menjadi petani kemudian berubah menjadi buruh yang hidupnya sangat bergantung pada kebaikan setan-setang uang. Mas Marco juga menambahkan, selama ini pabrik gula menyewa tanah rakyat dengan harga yang tidak wajar. Sebau tanah disewa dengan harga f.66,- untuk seumuran tebu, yaitu 18 bulan padahal kalau ditanami padi waktu

18 bulan itu bisa 3 kali tanam dengan hasil f.300,- jadi setiap bahu sawah pemilik lahan bisa rugi f.234,-. Masyarakat petani tidak bisa bersikap banyak akibat pemaksaan ini, karena di desa-desa sudah tidak ada lagi yang melindungi kepentingan para petani.

Di tahun 1916-1920, proses perluasan produksi tebu terus berlangsung, walaupun tuntutan untuk menguranginya semakin santer disuarakan Serikat Islam. Bila produksi gula tahun 1900 berjumlah 744.257 ton, maka di tahun 1915 menjadi 1.319.087 ton, tahun 1916 menjadi 1.629.827 ton, dan tahun 1917 menjadi 1.822.188 ton (Bezemer, 1921; Gie, 1999). Kapitalisme pabrik gula ini akhirnya mendapat protes keras dari Tjokroaminoto, Djajaningrat dan Sosrodanoekoesoemo:

Bagaimana telah dikabarkan, maka saudara Tjokroaminoto bersama-sama S.S. Hassan Djajaningrat dan Sosrodanoekoesoemo pergi ke Bogor boeat beremboek sama toean Gouverneur Generaal van Limburg Stirum tentang kekurangan makan, yang sekarang menerajang penghidupannya anak Bumiputera di Tanah Djawa sini. Akan tetapi sia-sia belaka! Permintaan-permintaan tentang hal itu, yang telah dilahirkan oleh perh. perh S.I., I.S.D.V., dan Insulinde akan

dipikirkan dan ditimbang dulu oleh pemerintah. Atas permintaannya saudara Tjokroaminoto, yang supaya kebun tebu mulai ini tahun dikurangi separo (50%) tuan van Limburg Stirum menjaut, jika temponya belum datang buat mengurangkan itu. Temponya belum datang of belum temponya buat mengurangkan itu kebun tebu.

Penanaman komoditas tebu secara besar-besaran ini pada akhirnya membawa dampak pada krisis beras. Harga barang meningkat drastis, peningkatan ini diakibatkan juga minimnya pasokan impor beras dari kawasan Asia Tenggara akibat Perang Dunia I. Pada tahun 1918 harga beras Jawa nomor 1 senilai f.12,-/pikul (1 pikul=100 kati=61,76 kg), harga ini dirasa sangat mahal di kalangan masyarakat waktu itu (Joe, 2004). Kemudian tahun 1919 mengalami kenaikan yang signifikan, beras Jawa 1 menjadi f.16,-/pikul, beras Jawa 2 menjadi f.15,-/pikul, beras Jawa 3 menjadi f.14,-/pikul, dan beras Siam seharga f.16,-/pikul.

Naiknya harga beras diimbangi dengan naiknya kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, tetapi tidak diimbangi dengan upah buruh. Sehingga penanaman tebu dianggap masyarakat sebagai penyengsaraan rakyat, sampai Tjokroaminoto menyarankan pengurangan

areal tebu sebanyak 50%. Namun usulan tersebut ditolak Gubernur Jenderal, bahkan Darsono menganjurkan untuk melakukan pemogokan sebagai bentuk kekuatan demonstrasi.

Sistem kapitalisme itulah akhirnya mendorong masyarakat desa melakukan protes. Protes itu salah satunya dilakukan dengan cara membakar lahan-lahan tebu. Menurut Suhartono (1991: 52), kebakaran itu disengaja oleh petani agar perkebunan mempercepat penyerahan sawah-sawah petani. Antara tahun 1885-1900 tercatat banyaknya kebakaran di daerah Wonogiri, Boyolali, Klaten, Surakarta dan Sragen secara berturut-turut 68, 45, 28, 25, dan 19 kali. Kemudian disusul wilayah Jawa Timur, seperti di Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo.

Selain bentuk protes melalui aksi dan pemogokan, gerakan sosial juga dilakukan dengan memanfaatkan media karya sastra untuk menyampaikan propaganda. Strategi tersebut pernah dilakukan Mas Marco Kartodikromo pada awal abad ke-20. Ia percaya kalau media karya sastra sangat membantu rakyat kecil untuk memahami situasi sosial, ekonomi, dan politik di tanah Hindia. Oleh sebab itu, Mas Marco menciptakan karya sastra dengan bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat pribumi secara luas, bahkan pendidikan rendah sekalipun. Selain itu,

peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam teks sastra adalah kondisi yang sangat dekat dengan keadaannya.

Dengan demikian, penelitian ini melihat sisi lain kalau gerakan sosial awal abad ke-20 tidak harus dilakukan dengan aksi dan pemogokan. Namun, teks karya sastra juga mempunyai potensi yang sama untuk memberikan modal pengetahuan kepada rakyat *kromo*, dan sama-sama memiliki potensi besar untuk dapat menggerakkan kesadaran pembaca dalam aksi gerakan yang kongkrit. Diterapkannya kebijakan pasal karet oleh pemerintah kolonial merupakan bukti kalau karya sastra bisa menstimulus seseorang untuk berbuat sesuatu.

## **2. KAJIAN TEORI**

Menurut Davis (2002), narasi memiliki tiga pemahaman, yakni narasi sebagai bentuk atau representasi dari urutan peristiwa, dan ini berfokus pada prinsip-prinsip struktur narasi; narasi sebagai cara bicara tentang peristiwa wacana yang dihasilkan narator, dan ini berfokus pada teknik narasi melalui sudut pandang; narasi sebagai tindakan verbal dalam transaksi sosial yang sangat terkait dengan konteks, dan sebagai sesuatu yang dibangun antara narator dan audien. Dengan demikian, narasi mengubah cerita menjadi informasi untuk menjadi

pengetahuan bagi penerima (audiens atau pembaca). Narasi punya bertanggung jawab atas bagaimana penerima memandang cerita, karena narasi adalah cara utama untuk mengorganisir dan mengkomunikasikan perasaan manusia terhadap dunia. Proses penafsiran yang integral untuk membentuk dan memahami sebuah cerita adalah inti dari pengetahuan manusia. Penyelidikan bentuk dan praktik naratif adalah cara yang bermanfaat untuk memahami bagaimana pengetahuan diperoleh dan ditransmisikan.

Menurut Davis (2002) narasi dalam gerakan sosial berfungsi untuk membongkar nilai, simbol, dan sumber kesadaran pembaca atau audien. Ganz (2001: 4), unsur yang paling penting dalam narasi dan gerakan sosial adalah identitas pendongeng dan pendengar. Identitas pendongeng akan memberi kredibilitas pada cerita, menghubungkan pendengar atau pembaca dalam suatu gerakan sosial bersama. Dengan demikian, hubungan antara narasi dan gerakan sosial perhatian pada mobilisasi keyakinan, ide, identitas kelompok, dan interaksi narator-pembaca dalam menegosiasi produksi makna. Hubungan keduanya merupakan bagian penting dalam posisi bahasa, yakni mengkonstruksi sosial untuk memicu tindakan kolektif, bahkan melampaui kerangka kerja identitas bahasa itu sendiri.

Dalam pemahaman Joseph E. Davis (2002), aktivitas dan kekuatan agensi dapat mempengaruhi adanya perubahan dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Narasi berfungsi untuk memandu tindakan partisipatif kolektif maupun tindakan individu, bahkan lebih jauh lagi Davis menyebut narasi itu sesuatu yang dapat dijadikan alat persuasif untuk merekrut anggota baru di dalam kelompok.

Narasi-narasi Mas Marco Kartodikromo pada masa kolonial dinilai sangat tabu dan berseberangan dengan pemerintah, misalnya menolak adat tradisional yang dilegitimasi kolonial, menampilkan sosok wanita-wanita radikal, persamaan hak pendidikan, persamaan hak antara warga Belanda dan warga Hindia Belanda, memberi kesadaran untuk membangun organisasi anti pemerintahan, menentang kebijakan pemerintah, mengkritik pemerintah, dan sebagainya. Narasi itu dikemas secara halus dan memakai bahasa Melayu pasar, supaya rakyat yang berpendidikan rendah dapat menikmati pesan dan kesan dalam karya sastra. Mas Marco memiliki harapan agar rakyat tersadar dan memahami terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Hindia Belanda, kemudian membangun kelompok-kelompok gerakan untuk menentang pemerintah kolonial. Menurut

Moeso (1925), membaca buku-buku dari kelasnya sendiri adalah cara yang cepat untuk datangnya suatu kemerdekaan. Dengan demikian, narasi media sastra yang dilakukan Mas Marco Kartodikromo merupakan bagian dari gerakan sosial untuk adanya perubahan. Gerakan itu bersifat memberikan pengaruh pada masyarakat pembaca secara luas di Hindia Belanda.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak sosial yang ditimbulkan akibat kapitalisme, kolonialisme, dan feodalisme Belanda di Hindia adalah maraknya kecu, pencurian ternak, pembegalan, pembunuhan, dan kerusuhan-kerusuhan lainnya. Menurut Suhartono (1991: 84), perbuatan-perbuatan tersebut merupakan akibat tidak tersedia jalan untuk mengadakan nasibnya, mereka menempuh jalan pintas, yakni bergerak melalui kekerasan dan kekuatan untuk mendapatkan haknya yang telah diambil oleh pemerintah kolonial. Namun, pemerintah kolonial menganggap kerusuhan tersebut sebagai tindakan kriminal tanpa melihat sebab-sebabnya yang lebih mendalam.

Dominasi Belanda menciptakan desintegasi yang meliputi: dominasi, ekonomi, politik, kultural. Dominasi ekonomi yang berupa perluasan monetisasi

faktor-faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, komoditas ekspor, dan pengenalan pajak baru jelas memperberat beban. Kehidupan petani menjadi sangat tergantung pada perusahaan perkebunan maupun penguasa kolonial. Sehubungan dengan perluasan agroindustri dan birokrasi, timbullah diferensiasi struktural yang menciptakan peranan baru dalam masyarakat.

Dominasi politik membuahkan hubungan yang tidak wajar sehingga terjadi ketegangan dan ketidakserasian. Dominasi kultural, mendesak norma-norma yang ada sehingga masyarakat kehilangan orientasi. Dalam keadaan seperti ini diperlukan pegangan hidup yang menuntut ke arah orientasi baru yang menentramkan. Jadi, protes sosial dan kerusuhan merupakan jalan keluar yang ditempuh oleh masyarakat dan gerakan sosial untuk mengembalikan situasi lama yang aman (Suhartono, 1991: 67).

Hal ini dapat dikatakan, bahwa salah satu penyebab kemiskinan rakyat petani Hindia adalah akibat datangnya pabrik gula. Sistem tersebut juga memantik protes dari semua kalangan pergerakan sosial di Hindia, salah satunya datang dari nama samaran Saturnus:

Demikianlah kebanyakan nasib Kromo yang sawahnya

telah disewa oleh onderneming dengan *contract*. Kromo semacam ini orang dapat melihat di mana Vorstenlanden. Akan tetapi saya rasa tak jauh bedanya dengan Kromo di lain tempat.

Dari itu saya ada pengharapan keras pada segala kaum kapitalisten, hendaklah tuan menaruh kasihan sedikit pada Kromo dan golongan proletariaat. Apabila Kromo mendapat salah, seharusnya diberi nasehat, jangan main tendang, main potong-main maki-makian-Kromo itu juga orang, bukan? Berilah olehnya bayaran dengan pantas, tiadakah tuan mengetahui bahwa ini waktu harga makanan serba mahal, terutama harga beras?? Bukankah Kromo telah bertahun-tahun membela keperluan tuan dan memberi keuntungan yang amat besar pada tuan??

Saturnus secara keras memprotes kebijakan pabrik gula yang selam ini telah menyusahkan kaum kromo. Upah yang didapatkan tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan, sekaligus kebutuhan

pokok yang semakin meninggi. Saturnus mengetuk hati para pemegang alat produksi untuk merasa kasihan dengan nasib kaum kromo, padahal selama bertahun-tahun kromo telah banyak membantu proses regulasi di pabrik gula.

Kalau penindasan kepada kromo terus berlangsung, maka Mas Marco memiliki strategi, yakni harus dilawan, seperti pada kutipan di bawah:

Sungguhpun amat berat orang bergerak memihak kepada orang yang lemah (orang yang tertindas), lihatlah adanya pemogokan yang berulang-ulang diwartakan dalam Sinar ini. Di situ sudah menunjukkan bilangannya berpuluh-puluh korban itu pemogokan, inilah memang sudah seharusnya.

Sebab melawan kaum yang mempunyai pabrik-pabrik itu sama artinya dengan melawan pemerintah yang tidak adil.

Sehingga tidak dapat dipungkiri, tulisan-tulisan Mas Marco cenderung simplistik dengan nuansa protes kepada kapitalisme ataupun pemerintah kolonial. Tulisan itu berusaha untuk membuka kesadaran masyarakat, kalau kapitalisme pabrik gula merupakan musuh yang nyata,

bahkan menjadi kesengsaraan masyarakat waktu itu. Berdasarkan analisa Gie (1999: 31), cara untuk mengatasi dari kekejaman kapitalisme adalah dengan jalan sosialisme, yaitu menasionalisasikan perusahaan-perusahaan yang penting bagi hajat hidup rakyat. Namun, jalan ini tidak mendapatkan pintu terbuka dari pihak pemerintah ataupun pihak pemodal sehingga bermunculan organisasi gerakan sosial yang revolusioner. Organisasi ini adalah jalan untuk menuju kemerdekaan buruh. Selanjutnya organisasi-organisasi tersebut memakai media surat kabar dan karya sastra untuk sarana propaganda, misalnya Mas Marco.

Kekejaman kapitalisme pabrik gula tidak hanya disuarakan Mas Marco melalui artikel, namun juga melalui balutan narasi-narasi halus. Seperti yang diilustrasikan melalui karakter tokoh Assistent Wedono dalam novel *Matahariah*. Karakternya sangat menentang kebijakan Belanda yang kolonialis dan kapitalis. Hal ini dibuktikan dengan perkataannya, kalau Belanda sebagai orang yang bangsat, suka menghisap darah rakyat, dan menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan harapan rakyat, seperti pada kutipan di bawah:

...itu directeur pabrik dapat uang dari minister buat membeli aandeelnya itu

pabrik. Tetapi keadaan serupa itulah boleh saya katakan main sulap, main putaran. Apakah hal itu tidak boleh saya katakan penghisap darah ? (Kartodikromo, 2008: 509).

Kutipan tersebut diucapkan oleh Assistent Wedono, dia menyebut kalau datangnya pabrik gula malah tidak mendatangkan bagi kesejahteraan rakyat, tetapi disebut assistent wedono sebagai penghisap darah rakyat. Bahkan Mas Marco memberi peringatan untuk rakyat Hindia supaya jangan bersahabat dengan pabrik gula karena pabrik ini yang pada akhirnya membuat rakyat tercekik

Sama rata itulah yang baik  
Hati yang suci harus ditarik  
Jangan bersahabat dengan pabrik  
Agar Kang Kromo janganmendelik

Hal yang sama juga pernah disinggung Darsono, kalau selama tumbuh-tumbuhan bisa hidup, *setan uang* (kapitalis) yang dengan rapi dilindungi oleh pemerintah dapat menyengsarakan rakyat. Tidak hanya berhenti sampai di situ, malahan desa-desa di Jawa harus juga menghasilkan untuk penguasa yang lebih tinggi. Sebagian dari penghasilan desa ditujukan untuk melangsungkan kehidupan penguasa yang lebih tinggi atau sebagai

barang ekspor. Hasil-hasil ini diserahkan ke atasan dalam bentuk upeti atau sewa (Niel, 1984: 33).

Pada kesempatan yang sama, Mas Marco juga menulis kalau kapitalis dan pemerintah sama-sama membangun kerjasama untuk membuat rakyat Hindia semakin miskin.

Tentu saudara telah mengetahui bahwa, pabrik itu semakin bersekutu dengan pemerintah, sebab boleh jadi aandelhaoudernya pabrik itu yang sebagian besar orang-orang yang sama memerintah anak Hindia. Dari itu tidak salah lagi, kalau itu perkara saya sebut main putaran atau sulapan. Saya kira banyak saudara-saudara yang telah tahu, bahwa semua AW yang ada di sini sama takut kepada Belanda pabrik, kadang-kadang Administrateur pabrik itu dapat sesebutan Kanjeng Tuan dari AW yang tidak mempunyai kemanusiaan itu (Kartodikromo, 2008: 533).

Kutipan tersebut merupakan teks yang disampaikan Assistent Wedono saat *vergadering* di rumah lurah dengan dihadiri beberapa rakyat. Teks tersebut

menunjukkan suatu kesan, bahwa Assistent Wedono sangat membenci pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda. Baik jabatan lurah ataupun Assistent Wedono merupakan perpanjangan tangan kapitalis, dan kapitalis pabrik gula sudah bekerjasama dengan pemerintah.

Menurut anggapan Assistent Wedono, datangnya pabrik gula ini sangat menyengsarakan rakyat Hindia karena rakyat dipaksa menanam tanaman yang mereka tidak sukai, yakni tanaman tebu. Tanah-tanah di pedesaan disewa pabrik gula dengan harga yang sangat murah, tidak sebanding hasilnya apabila lahan mereka ditanami tanaman padi, seperti kutipan:

Penyakit yang saya katakan berbahaya sekali itu: PABRIK, itu kepanjangan dari kapital sistem bangsa Eropa yang sudah bertahun-tahun ada di tanah kita (Kartodikromo, 2008: 535).

Datangnya pabrik gula ini, malah menjadikan pekerjaan rakyat semakin berkurang karena rakyat sebelumnya mengelola gula, nila, dan kopi dengan cara tradisional akhirnya mereka kehilangan daya saing, bahkan memutuskan untuk

menjadi kuli di pabrik dengan upah murah. Assistent Wedono mengkritisi, upah yang didapatkan dari buruh di pabrik di bawah 50 cent, bahkan 25 cent sehari, nominal ini tidaklah mencukupi untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya kaum buruh. Pemerintah yang seharusnya melindungi hak dan kemerdekaan rakyat, malah berbalik melindungi pabrik-pabrik (Kartodikromo, 2008: 534-536).

Kondisi sosial dan ekonomi yang semakin memburuk menjadikan masyarakat Hindia gelisah. Situasi ini menimbulkan banyak jumlah pemogokan di beberapa jawatan pemerintah dan perusahaan swasta. Selain itu merosotnya nilai upah dan meningkatnya harga kebutuhan pokok untuk kaum buruh. Pemogokan-pemogokan pada tahun 1918-1919 yang dilancarkan oleh beberapa organisasi serikat buruh berhasil dengan baik, dalam pengertian tuntutan-tuntutan kenaikan upah dapat dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan Belanda (Razif, 2005: 58).

Baik antara kondisi kontekstual dengan kondisi tekstual yang disajikan Mas Marco di dalam teks sastranya merupakan dua simbiosis yang saling melengkapi. Teks sastra diramu Mas Marco dengan bahasa ringan agar rakyat kromo dapat mengerti dengan mudah. Pada akhirnya dapat menciptakan

kesadaran pembaca, dan menanamkan sikap kritis terhadap permasalahan yang ada.

Dalam novel *Matahariah* juga dimunculkan peristiwa pentingnya, yakni hadirnya organisasi gerakan sosial. Tokoh Assisten Wedono dalam novel *Matahariah* merupakan tokoh rekaan yang diilustrasikan dapat memberikan suatu alternatif untuk menentang kebijakan pemerintah dan kapitalisme di Hindia. Penentangan ini dilakukan dengan strategi menyatukan organisasi gerakan sosial yang ada di tanah Hindia. Kunci kekuatan melawan pemerintah kolonial adalah dengan sikap sadar rakyat pribumi untuk bersatu. Persatuan itu harus dibekali dengan rukunnya sesama rakyat Hindia, seperti kutipan:

Hal ini sesungguhnya salah kita sendiri, sebab kita suka dipandang budak oleh orang-orang yang buas. Kalau kita orang bisa rukun dengan teman-teman sendiri sampai beribu-ribu banyaknya, tentu kita bisa melawan orang-orang yang buas itu. Kalau orang-orang yang buas itu sudah jadi baik atau lenyap, di situlah waktunya kita melakukan adatnya manusia yang baik-baik, tetapi tidak

membunuh sesama manusia  
(Kartodikromo, 2008: 517).

Narasi teks di atas bukan lahir begitu saja, tanpa adanya peristiwa yang mengikutinya. Karakteristik Mas Marco dalam menciptakan suatu karya tidak lepas dari kondisi sosio-budaya yang dilihat dan dialaminya. Kata 'buas' yang dimaksud di atas adalah bisa jadi kapitalis, pemerintah, priyayi penjilat, dan kompeni. Mas Marco secara terus terang menyebutkan, kalau rakyat Hindia selama ini hanya sebagai budak dari orang-orang buas. Oleh sebab itu, Mas Marco memberikan petunjuk kepada rakyat kromo untuk hidup rukun dan bersatu melawan pemerintah kolonial karena penyebab keburukan atas situasi dan kondisi di tanah Hindia adalah orang Belanda. Melalui perlawanan inilah, kemerdekaan itu akan bisa dicapai. Namun, kalau orang yang buas itu hatinya bisa luluh dan baik, maka perlawanan itu tidak perlu dilakukan dan sepatutnya untuk menerapkan adat manusia, yakni tolong menolong dan tidak saling membunuh.

Kutipan narasi di atas membuktikan, bahwa Mas Marco condong pada sikap suka damai dengan siapapun tanpa adanya penindasan antar manusia. Dapat masuk pada kelompok sosialis, internasionalisme, ataupun komunis. Mas

Marco secara ketat tidak membedakan ketiga ideologi tersebut. Namun, kalau jalan damai tidak dapat ditempuh, Mas Marco tidak segan-segan untuk memprotes melalui jalur narasi simbolik, seperti di bawah ini:

...Kalau saya sudah berhenti dari pekerjaan, saya hendak membikin perkumpulan, maksudnya itu perkumpulannya supaya bangsa kita dapat persamaan dengan semua bangsa Eropa yang ada di sini, dan bangsa kita orang-orang desa dapat penghidupan secukupnya. Sebab kalau saya tidak berani menempuh itu pekerjaan tentu kita anak Hindia susah semua (Kartodikromo, 2008: 529).

Ungkapan tersebut diucapkan tokoh rekaan Assistent Wedono pada novel *Matahariah*. Tokoh Assistent Wedono adalah tokoh simbol sebagai orang yang bekerja di pemerintahan tetapi memiliki dedikasi bekerja untuk rakyat pribumi. Assistent Wedono menolak stigma dan kebijakan pemerintah tentang perbedaan ras. Perkumpulan yang rencana dibuat Assistent Wedono untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak setuju adanya sikap rasisme yang ditunjukkan oleh orang Belanda.

Berdasarkan pandangan Mas Marco, rasisme akan berdampak pada kesenjangan ekonomi rakyat Hindia, karena orang pribumi yang dapat mengenyam pendidikan layak Eropa adalah orang-orang priyayi. Orang yang berpendidikan inilah pada saatnya yang menguasai sistem ekonomi mapan di Hindia.

Berdasarkan pandangan Assistent Wedono, mereka (kompeni ataupun kapitalis) dinilai sebagai orang yang tidak memiliki sifat kemanusiaan, maka tidak perlu dipanggil Kanjeng Tuan atau dihormati. Kegiatan *vergadering* bagian dari perlawanan dirinya dan mengajak orang-orang untuk melawan Belanda. Oleh sebab itu, gerakan sosial yang dibentuk Assistent Wedono diberi nama *Kromo Bergerak* (Kartodikromo, 2008: 533). *Kromo* berarti orang-orang miskin dan *bergerak* berarti maju pantang mundur dan siap melakukan perlawanan.

Tujuan terpenting adanya kelompok gerakan sosial yang digagas Assistent Wedono adalah: (a) merukunkan sama-sama rakyat pribumi untuk bersatu mengangkat derajat Hindia supaya tidak diperas oleh bangsa Belanda; (b) menaikkan kehormatan bangsa Hindia; (c) bersatu rakyat pribumi untuk menciptakan tujuan bangsa Hindia; (d) melawan tanam paksa yang sudah diterapkan pemerintah; (e) menuntut kenaikan upah buruh pabrik

gula; (f) menuntut pemerolehan pendidikan yang layak bagi rakyat Hindia; (g) melawan adanya rasisme; (h) menolak kesenjangan antara sekolah Kristen dan hak bersekolah untuk orang Islam; (i) menuntut persamaan gaji antara pekerja Eropa dengan pekerja pribumi Hindia; (j) melawan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan harapan rakyat Hindia

Secara tidak langsung, ungkapan dan karakter tokoh Assistent Wedono mengajarkan kepada pembaca kalau adanya kebijakan atau sesuatu yang merugikan rakyat pribumi, maka perlu didirikan kelompok gerakan sosial. Kelompok ini bagian dari suara bersama dan kekuatan bersama. Di sini Mas Marco memahami, apabila argumentasi hanya satu suara, maka suara tersebut bukan menjadi suatu kekuatan. Novel *Matahariah* menampilkan narasi peristiwa organisasi seakan dapat memantik pembaca untuk ikut dan berperan aktif membangun organisasi gerakan sosial karena melalui organisasi pula kekuatan dominan itu dapat diciptakan dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki.

#### 4. KESIMPULAN

Hadirnya suatu teks tidak dapat dilepaskan dari peristiwa-peristiwa yang mengikutinya sehingga teks Mas Marco merupakan upaya pembaca dalam

transaksi sosial. Teks-teks itu bukan semata-mata teks fiksi tetapi teks itu syarat akan kepentingan yang sesuai arah gerakan sosialnya. Mas Marco merupakan penulis yang sangat kuat pada pendirian, yakni memerdekakan orang tertindas dan memerdekakan tanah air Hindia dari kolonialis Belanda.

Narasi teks sastra Mas Marco secara simbolik menunjukkan suatu harapan penulis akan hadirnya suatu kebersamaan dan persatuan sesama rakyat Hindia. Dalam konteks novel itu diciptakan, teks Mas Marco dapat dijadikan modal pengetahuan, bahwa suatu kekuatan harus didukung oleh solidaritas yang solid antar organisasi gerakan sosial. Mas Marco berkepentingan kalau teks novel *Matahariah* dan kumpulan puisi *Sair Rempah-Rempah* adalah bagian dari impian dan tujuan, yang pada akhirnya menginspirasi seseorang untuk mengharapkan adanya kekuatan politik kaum pribumi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baay, Reggie. 2017. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. Depok: Komunitas Bambu.
- Bezemer, T.J. 1921. *Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Leiden: Brill.
- Gie, Soe Hok. 1999. *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Serikat Islam Semarang 1917-1920*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Joe, Liem Thian. 2004. *Riwayat Semarang*. Jakarta: Hasta Wahana.
- Kartodiharjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kartodikromo, Mas Marco. 1918. *Sair Rempah-Rempah*. Semarang: Drunk N.V. Sinar Djawa.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Matahariah*, dalam *Karya-Karya Lengkap Mas Marco Kartodikromo* editor Agung Dwi Hartanto. Jakarta Pusat: I:BOEKOE.
- Mubyarto, dkk. 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Niel, Robert van. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Razif. 2005. *Bacaan Liar Budaya dan Politik pada Zaman Pergerakan*. Jakarta: Edi Cahyono Experience.

Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial dan Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Wasino. 2008. *Kapitalisme Bumiputera: Perubahan Masyarakat Mangkunegara*. Yogyakarta: LKIS.

### **Surat Kabar**

*Sinar Djawa*, 20 Februari 1918

*Sinar Djwa*, 26 Maret 1918

*Sinar Djawa*, 11 April 1918.

*Soeara Ra'jat*, 19 April 1918

*Sinar Hindia*, 13 Mei 1918

*Sinar Hindia*, 14 Mei 1918

*Sinar Hindia*, 15 Mei 1918

*Sinar Hindia*, 27 Juni 1918

*Sinar Hindia*, 14 Januari 1919

*Sinar Hindia*, 28 Januari 1919